

ANALISIS PERAN MEDIA DALAM MEMPENGARUHI KEBERLANJUTAN *JOINT PRODUCTION* ANTARA INDONESIA - KOREA SELATAN

Endro Tri Susdarwono
Universitas Peradaban

Article Info

Article history:

Received Sep 25, 2020

Revised Okt, 2020

Accepted Desember 8, 2020

Keywords:

First keyword

Second keyword

Third keyword

Fourth keyword

Fifth keyword

Abstrak

Tujuan penelitian ini membahas mengenai analisis peran media dalam mempengaruhi keberlanjutan kerjasama joint production kapal selam Changbogo dan pesawat tempur KF-X/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, tipe penelitiannya menggunakan kajian komprehensif analitis dan pendekatannya normatif analitis. Di dalam perkembangan media mutakhir, setidaknya tidaknya ada dua kepentingan utama di balik media, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan, yang membentuk isi media, informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya. Pemberitaan yang diwujudkan dalam tema-tema tertentu yang kemudian baik disengaja maupun tidak, mengerucut ke beberapa tema pemberitaan yang cenderung berpihak terhadap keberlanjutan kerjasama joint production pembuatan kapal selam Changbogo dan pesawat tempur KF-X / IF-X. Tema - tema yang diangkat media utamanya dalam pemberitaan media mengenai kedaulatan wilayah laut Indonesia, kejayaan Angkatan laut Indonesia khususnya tentang Corps Kapal Selam dan Angkatan Udara era Soekarno, maraknya pencurian ikan dan pasir laut di wilayah Indonesia, pelanggaran kedaulatan wilayah laut dan udara Indonesia disebabkan karena lemahnya alutsista Indonesia dalam menjaga wilayahnya, serta pemberitaan media mengenai modernisasi alutsista Indonesia utamanya tentang kerjasama pembuatan kapal selam Changbogo dan pesawat tempur KF-X / IF-X antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan.

Corresponding Author:

Endro Tri Susdarwono

Universitas Peradaban

Glempang, Pagojengan, Kec. Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52276

Email: saniscara99midas@gmail.com

PENDAHULUAN

Media merupakan sarana komunikasi bagi masyarakat, yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung (Agustin, 2011). Media massa meliputi media cetak, media elektronik dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya, begitupula dengan media elektronik terbagi menjadi dua macam, diantaranya radio dan televisi, sedangkan media online meliputi media internet seperti website, dan lainnya (Yunus, 2010).

Media komunikasi massa memiliki pengaruh dalam membangun dan mengarahkan pandangan khalayak terhadap peristiwa yang terjadi. Peristiwa-peristiwa sentral yang dikemas oleh media dapat menjadi alat dominasi yang bersifat eksklusif di lingkungan media sendiri sehingga membentuk sebuah wacana. Wacana-wacana ini dibuat sedemikian rupa secara halus dan tidak kentara, padahal di dalamnya terbingkai banyak kepentingan yang berlangsung (Muslim, 2013).

Perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di balik media tersebut, khususnya kepentingan terhadap informasi yang disampaikannya. Di dalam perkembangan media mutakhir, setidaknya ada dua kepentingan utama di balik media, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan, yang membentuk isi media, informasi yang disajikan, dan makna yang ditawarkannya. Di antara dua kepentingan utama tersebut, ada kepentingan lebih mendasar yang justru terabaikan, yaitu kepentingan public. Media yang seharusnya berperan sebagai ruang public, disebabkan oleh kepentingan-kepentingan di atas, justru mengabaikan kepentingan public itu sendiri.

Kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang sesungguhnya menjadikan media tidak dapat netral, jujur, adil, objektif, dan terbuka. Akibatnya, informasi yang disuguhkan oleh media telah menimbulkan persoalan objektivitas pengetahuan yang serius pada media itu sendiri. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran atau kebenaran palsu; menyampaikan objektivitas atau subjektivitas; bersifat netral atau berpihak; merepresentasikan fakta atau memelintir fakta; menggambarkan realitas atau mensimulir realitas (Piliang, 2005).

Peran media dalam ikut mempengaruhi keberlanjutan kerjasama joint production kapal selam Changbogo dan pesawat tempur KF-X/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan merepresentasikan kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik. Informasi yang disuguhkan cenderung untuk memperkuat argumen yang menyajikan bahwa kerjasama itu perlu dilanjutkan. Informasi yang cenderung subjektivitas diketengahkan ke publik dan masyarakat pada umumnya.

Publik, dan masyarakat pada umumnya, berada di antara dua kepentingan utama media ini, yang menjadikan mereka sebagai mayoritas yang diam, yang tidak mempunyai kekuasaan dalam membangun dan menentukan informasi di ranah public milik mereka sendiri. Di satu pihak, ketika ranah public dikuasai oleh politik informasi atau politisasi informasi, yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan politik, media menjelma menjadi perpanjangan tangan penguasa dengan menguasai ruang publik tersebut; di pihak lain, ketika ia dikuasai oleh ekonomi-politik informasi, informasi menjadi alat kepentingan mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan cara mengeksploitasi public, sebagai satu prinsip dasar dari kapitalisme (Piliang, 2005).

Perbincangan mengenai media sebagai sebuah diskursus, dengan demikian, tidak dapat dipisahkan dari kesalingberkaitan antara bahasa yang digunakan di dalamnya, pengetahuan yang melandasinya, serta bentuk-bentuk kepentingan dan kekuasaan yang beroperasi di balik bahasa dan pengetahuan tersebut, artinya, perbincangan mengenai media tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang membentuknya, yang pada akhirnya memengaruhi bahasa (gaya, ungkapan, kosakata, tanda) yang digunakan dan pengetahuan (keadilan, kebenaran, realitas) yang dihasilkannya.

Selain itu, perbincangan mengenai media dalam konteks kepentingan-kepentingan di baliknya, pada kenyataannya, tidak dapat dilepaskan dari berbagai paradoks pengetahuan yang dihasilkannya; objektivitas/subjektivitas, kebenaran/kepalsuan, realitas/simulakara, fakta/rekayasa, transparansi/kekaburan, kejujuran/kepalsuan, keadilan/keberpihakan. Berbagai paradoks pengetahuan ini

muncul ketika media menjadi bagian dari sebuah sistem ideologi (ideologi ekonomi atau politik) dan sistem kekuasaan, yang sangat menentukan arah perkembangannya dengan mengabaikan kepentingan public yang lebih luas (Piliang, 2005).

Pemberitaan yang diwujudkan dalam tema-tema tertentu yang kemudian baik disengaja maupun tidak, mengerucut ke beberapa tema pemberitaan yang cenderung berpihak terhadap keberlanjutan kerjasama joint production pembuatan kapal selam Changbogo dan pesawat tempur KF-X / IF-X. Tema tersebut berkuat tentang pemberitaan luasnya wilayah laut Indonesia dimana diketengahkan bahwa luasnya wilayah laut Indonesia mengharuskan agar Indonesia memiliki Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang kuat dalam rangka menjaga wilayah kedaulatan. Kekuatan tersebut harus diwujudkan dengan memiliki korps kapal selam yang kuat beserta dengan kekuatan udaranya dengan representasi berupa kepemilikan pesawat tempur yang memadai. Tema berikutnya mengetengahkan karena lemahnya Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia mengakibatkan maraknya pencurian ikan dan pasir laut di wilayah Indonesia. Pelanggaran wilayah yang sering dilakukan oleh negara lain terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.

Tema yang lain diwujudkan dalam pemberitaan mengenai kerinduan warga negara Indonesia terhadap kejayaan Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Era Soekarno. Banyak tema yang mengangkat kejayaan corps kapal selam era 1960-an dimana Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di Asia, Angkatan Udara pun tidak lepas dari pemberitaan dimana pada waktu itu terjalin kerjasama yang erat antara Uni Soviet dan Indonesia dalam membangun kekuatan udara Indonesia. Kerinduan akan kejayaan ini memunculkan suatu gagasan untuk melakukan modernisasi alutsista Indonesia dengan salah satunya mengadakan joint production dengan negara lain.

Apa yang disebut sebagai hiperealitas media sesungguhnya berkembang ketika media dikendalikan oleh dua kepentingan utama di atas (kepentingan ekonomi dan politik), yang di dalamnya objektivitas, kebenaran, keadilan, dan makna sebagai kepentingan public dikalahkan oleh subjektivitas, kesemuan, dan permainan Bahasa. Media boleh jadi mencoba untuk merepresentasikan peristiwa-peristiwa secara objektif, jujur, adil, transparan, akan tetapi berbagai bentuk tekanan dan kepentingan ideologis tersebut di atas telah menyebabkan ia dapat terperangkap ke dalam politisasi media (subjektivitas, kepalsuan, ketidakadilan, dan keberpihakan) dan hiperealisasi media yang tidak menguntungkan public - politics of signification.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media dalam mempengaruhi keberlanjutan kerjasama joint production Kapal Selam Changbogo dan Pesawat Tempur KF-X/ IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan

METODE PENELITIAN

Metode ilmiah yang digunakan untuk penelitian dinamakan metodologi penelitian. Metode ialah cara kerja untuk dapat memahami objek penelitian. Di samping metode dikenal pula Teknik penelitian, Teknik diartikan sebagai alat kerja yang merupakan kelengkapan cara kerja (metode). Sebenarnya Teknik tercakup di dalam metode, yang bila dipandang dari segi pelaksanaannya. Metode sebagai alat kerja lebih ditekankan kepada cara kerja pikiran dalam rangka memahami objek penelitian. Teknik dipandang sebagai cara kerja untuk melakukan atau menangkap hasil cara kerja pikiran (metode).

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menganalisis peran media dalam mempengaruhi keberlanjutan kerjasama joint production Kapal Selam Changbogo dan Pesawat Tempur KF-X/ IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan, sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, itu dapat mengenai kondisi/hubungan yang ada. Pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat/efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hegemoni Politik atau Media

Istilah hegemoni berasal dari Bahasa Yunani *egemonia* yang berarti penguasa atau pemimpin. Dalam pengertian tradisionalnya, hegemoni diartikan sebagai sistem kekuasaan atau dominasi politik yang di dalamnya sebuah kelas dominan menggunakan kekuasaannya untuk menguasai kelompok yang dikuasai. Di dalam tradisi marxisme, istilah tersebut kemudian diperluas ke arah hubungan kekuasaan di antara kelas-kelas social, khususnya dalam pengertian kelas berkuasa. Termasuk ke dalam kelas berkuasa ini adalah kekuasaan ekonomi, yaitu dalam hubungan antara kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja (proletariat) (Piliang, 2005).

Dapat dilihat di sini bahwa dalam tradisi marxisme sebelum Gramsci maupun tradisi sebelumnya, istilah hegemoni digunakan untuk menjelaskan fenomena kekuasaan politik, termasuk ekonomi - politik. Antonio Gramsci - seorang pemikir marxis Italia - mencoba memperluas pengertian konsep hegemoni ini, sehingga konsep yang lebih luas itu dapat digunakan untuk menjelaskan tidak hanya relasi antarkelas politik (*rulling class/ruled class*), akan tetapi relasi-relasi social yang lebih luas, seperti relasi gender, ras, agama, bahkan gaya hidup. Gramsci id dalam *Slections From Prison Notebooks* menjelaskan konsep hegemoni tidak hanya dalam pengertian dominasi politik lewat kekuatan, akan tetapi dominasi lewat kepemimpinan intelektual dan moral (Gramsci, 1991). Apa yang ingin dikatakan Gramsci di sini adalah bahwa di dalam sebuah sistem kekuasaan harus ada kombinasi antara kekuatan dan penerimaan public yang berlangsung lewat mekanisme kepemimpinan intelektual dan moral.

Kekuatan (militer, massa) harus dikombinasikan dengan penerimaan public, yaitu pengakuan public atas ide hegemonis, sehingga dapat diciptakan sebuah keseimbangan, dalam pengertian bahwa kekuatan tidak mengalahkan penerimaan public. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, harus ada upaya terus menerus untuk memastikan adanya legitimasi atau penerimaan public atas sebuah kekuatan senjata melalui sebuah mekanisme opini public. Media massa (koran, televisi, dan sebagainya) berperan besar dalam membentuk opini public ini, disebabkan sifat jangkauannya yang luas (Gramsci, 1991).

Berikut pemberitaan media mengenai beberapa sengketa antara Indonesia dan negara lain ide hegemonis yang berperan besar dalam membentuk opini public:

“...Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di selat Makasar yaitu: pulau Sipadan. Kasus Sipadan Ligitan merupakan kasus yang sangat terkenal bagi rakyat Indonesia. Kasus ini merupakan kasus panjang yang akhirnya membuat Indonesia kehilangan dua pulau yaitu Sipadan dan Ligitan. Kasus ini yang membuat kemudian muncul kasus baru seperti kasus Ambalat. Kasus ini memang sangat sensitif mengingat kasus ini menyangkut wilayah kedaulatan yang sangat kaya akan sumber daya alam dan memiliki daya tarik di bidang pariwisata...”

Sumber: <http://hidayatpratama.blogspot.com/2012/05/uraian-singkat-kasus-sengketa-indonesia.html>

“...Malaysia sepertinya tidak berhenti membuat ulah. Berulang kali diperingatkan, armada Negeri Jiran masih saja menembus batas laut dan udara Indonesia. Situasi ini tentu saja membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Salah satu yang sempat membuat heboh ketika kapal perang Malaysia tiba-tiba memasuki wilayah perairan Ambalat tanpa izin.

“...Negara serumpun Malaysia kembali berulah. Kali ini helikopter carteran yang membawa menteri pertanian Malaysia mendarat di lapangan helipad Yonif 521 Kampung Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pesawat militer Malaysia disebut-sebut memasuki dan melanggar wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, Blok Ambalat. Kejadian ini tercatat yang kesekian kali...”

“...Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menyatakan, hingga saat ini sudah sembilan kali pesawat perang milik Malaysia tersebut masuk ke wilayah udara

Indonesia tanpa izin. Komandan Lanud Tarakan Letkol Penerbang Tiopan Hutapea mengatakan adanya pesawat asing yang memasuki wilayah udara Ambalat dan terpantau Satuan Radar 225 Kosek II, Kohanudnas di Tarakan, Kalimantan Utara...”

“...Hubungan antara Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Pemicunya, kapal perang milik Malaysia tiba-tiba memasuki wilayah perairan Ambalat tanpa izin...”

[Faiq Hidayat](#), [Didi Syafirdi](#), Sumber ©2015 Merdeka.com.

Pembentukan opini public sangat penting dalam prinsip hegemoni, yang untuk itu diperlukan mediasi berupa ruang public dengan karakter dan perubahannya. Konsep hegemoni tidak semata konsep abstrak, yang di dalamnya berlangsung dominasi ide-ide kultural, melainkan sebuah proses konkret yang memerlukan materialitas. Artinya, diperlukan perwujudan material dari dominasi ide-ide tersebut. Dalam hal ini, sangat penting apa yang disebut Gramsci struktur material dan institusi, yang berperan dalam mengembangkan dan menyebarkan ide-ide hegemonis. Gramsci menyebut struktur tersebut sebagai alat hegemoni, seperti sekolah, gereja, masjid, media massa, bahkan arsitektur atau nama jalan (Mouffe, 1979). Di dalam abad informasi sekarang ini, media merupakan alat hegemonis yang sangat sentral perannya dalam menyampaikan ide-ide hegemonis tersebut, disebabkan jangkauannya yang luas, aksesnya yang lebih terbuka, serta sifatnya yang menghibur. Alat-alat hegemoni tersebut di atas, ketika dikombinasikan dan digunakan oleh kelas dominan tertentu, akan membentuk apa yang disebut Gramsci struktur ideologi dari sebuah kelas dominan.

Berikut konsep hegemoni yang merupakan sebuah proses konkret yang memerlukan materialitas yang ditampilkan melalui pemberitaan media:

“...Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasional sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau. Tommy Hendra Purwaka melalui jurnal Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (2014) mengatakan perairan laut Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu: Laut teritorial (territorial sea) Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone) Menurut UU Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 2 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Ini ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia. Perairan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia...”

Sumber: <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/17/18000069/3-pembagian-wilayah-laut-indonesia?page=all>.

Louis Althusser mengembangkan konsep ideologi yang serupa dengan konsep alat hegemoni Gramsci ini, yang disebutnya alat ideologi negara (ideological state apparatus - ISA) (Mouffe, 1979). Alat ideologi negara berfungsi untuk menanamkan ideologi ke dalam masyarakat secara luas melalui proses inerpelasi melalui berbagai apparatus, seperti sekolah, rumah ibadah, sekolah, termasuk media. Sebagai apparatus-aparatus negara, alat ideologi negara tampak bersifat pasif di hadapan kekuatan negara yang dominan dan mengontrolnya. Konsep alat hegemoni yang ditawarkan Gramsci, sebaliknya, lebih bersifat dinamis dan lentur, dalam pengertian bahwa alat-alat hegemoni tersebut menjadi ajang dari sebuah perebutan di dalam medan perang hegemoni yang di dalamnya terjadi perjuangan aktif dalam memperebutkan sebuah posisi hegemoni yang tidak ada akhirnya.

Konsep ideologi yang serupa dengan konsep alat hegemoni Gramsci ditampilkan media melalui konsep Indonesia sebagai negara maritime yang mayoritas wilayahnya adalah lautan disertai dengan kedaulatan terhadap ZEE melalui UNCLOS

“...Insiden masuknya kapal nelayan Tiongkok ke perairan Laut Natuna Utara meningkatkan tensi hubungan negara panda itu dengan Indonesia. Pemerintah menganggap aktivitas nelayan yang dikawal kapal penjaga pantai telah mengganggu

hak berdaulat Indonesia di laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sebagai negara maritim, batas wilayah Indonesia mayoritas berada di lautan. Pengaturan batas tersebut telah diatur United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982. Ada tiga kategori batas laut yang diatur dalam hukum laut internasional itu. Batas pertama adalah laut teritorial yang diukur sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal pulau. Di area ini, Indonesia berdaulat penuh (sovereignty) atas segala sumber daya alam...”

Sumber: <https://katadata.co.id/infografik/2020/01/11/negara-maritim-ini-tiga-batas-laut-indonesia>

Sbagai sebuah alat hegemoni - yang di dalamnya ide-ide hegemonis disebarluaskan dan diperebutkan - media massa - berdasarkan pandangan hegemoni Gramsci, tidak dilihat sebagai sebuah alat kekuasaan hegemonis yang pasif yang hanya menjadi kendaraan bagi kekuasaan dominan untuk menancapkan dan melanggengkan kekuasaannya. Dalam strukturnya yang ideal, totalitas media massa - yaitu keberadaan berbagai media massa yang plural di dalam sebuah ruang social yang sama, termasuk media tandingan atau media alternative - membentuk sebuah ruang tempat berlangsungnya sebuah perang Bahasa atau perang symbol dalam rangka memperebutkan penerimaan public atas gagasan-gagasan ideologis yang diperjuangkan. Di dalamnya berlangsung sebuah proses hegemoni dan hegemoni tandingan secara tanpa akhir, yang melibatkan totalitas Bahasa dan symbol-simbol.

“...Mungkin banyak diantara kita sebagai bangsa Indonesia yang tidak banyak mengetahui bahwa Angkatan Laut Indonesia mempunyai Kapal Selam, wajar karena sangat minim diberitakan, kali ini Pristas akan mengenalkan tentang . ‘*Tabah Sampai Akhir*’ atau “ *Wira Ananta Rudhiro* “ adalah moto kapal selam (KS) kita, moto yang dikenal sejak ALRI mengoperasikannya tahun 1959. Pengoperasian KS ini adalah keputusan politik yang jitu, sebagai negara maritim KS adalah sesuatu yang mutlak diperlukan. Untuk itu sejak Agustus 1958 Indonesia mengirim 110 personelnya ke Eropa Timur, berangkat dari Surabaya dengan kapal laut Heinrich Jensen berbendera Denmark. “ **Sekali menyelam, maju terus - tiada jalan untuk timbul sebelum menang. Tabah Sampai Akhir** “

Di dalam medan hegemoni, dengan demikian, sangat penting peran Bahasa, symbol, dan tanda-tanda dalam perjuangan memperebutkan penerimaan public. Hegemoni, terutama di dalam masyarakat informasi dewasa ini, sangat mengandalkan kekuatan Bahasa dan symbol dalam perjuangan mengambil hati public terhadap sebuah ide atau gagasan hegemonis yang ditawarkan, ketimbang sekadar kekuatan senjata. Bahkan, pada tingkat tertentu, disebabkan tingginya persaingan dalam memperebutkan hati public ini, media-media politik menggunakan pla dan perbendaharaan tanda yang biasa digunakan di dalam media komersial seperti iklan. Sistem gagasan atau kepercayaan dominan itu sendiri, di dalam era informasi dewasa ini, tidak akan berarti dan berpengaruh apa apa bila ia tidak mampu dikemas menjadi sebuah kemasan informasi, sehingga melaluinya keseluruhan proses social dikendalikan oleh makna-makna dan nilai-nilai dominan yang dikembangkan di dalamnya. Di pihak lain, yang tidak kalah pentingnya di dalam konsep hegemoni Gramsci adalah bagaimana bahasa, tanda, makna, dan nilai-nilai dominan tersebut selalu dipertanyakan, digugat, ditentang, dilawan secara tanpa henti melalui berbagai bentuk perjuangan politik tanda dan pertandaan.

Berikut adalah informasi yang dikemas media sehingga berpengaruh berupa kemasan informasi dengan mengandalkan kekuatan bahasa dan symbol dalam perjuangan mengambil hati public terhadap sebuah ide atau gagasan hegemonis yang ditawarkan. Beberapa konflik dan pencurian ikan dikemas sehingga melalui bahasa dan symbol menyatakan ketidakmampuan Indonesia dalam menjaga Wilayah laut dan udaranya. Sehingga sangat diharapkan dengan adanya kerjasama pembangunan alutsista kapal selam Changbogo dan pesawat tempur KF-X / IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi solusi yang bisa dikemukakan.

“...Konflik antara pemerintah China dengan Indonesia terkait Laut Natuna memiliki cerita panjang. Sejak 2016 hingga saat ini, persoalan ini seakan hilang-timbul.

Sejumlah faktor melatarbelakangi konflik tersebut. Di antaranya, masuknya kapal China ke Laut Natuna tanpa izin maupun perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Berikut rinciannya: 1. Konflik RI-China di Natuna Tahun 2016 Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan China terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal China yang masuk ke Perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi, proses penangkapan tidak berjalan mulus, lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard China yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP HIU 11 menangkap KM Kway Fey 10078. Susi Pudjiastuti yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) meminta Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes kepada China...”

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/04/150845465/riwayat-konflik-china-indonesia-di-laut-natuna?page=2>.

“...Konflik di perairan Natuna berpotensi terus berulang selama Indonesia dan Vietnam tidak mencapai kesepakatan terkait batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), ujar peneliti politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lidy Sinaga. Lidy menyebut konflik di perairan Natuna terjadi karena belum terciptanya kesepakatan antara Indonesia dan Vietnam terkait ZEE di perairan itu...”
Callistasia Wijaya BBC News Indonesia, 1 Mei 2019

“...Indonesia sebagai salah negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah perairan sekitar 75% dari wilayah kedaulatannya yang bersinggungan beberapa negara. Sehingga keberadaan perlindungan terhadap wilayah perairan atau laut di Indonesia dianggap sangat penting untuk mengingat besarnya peluang bagi negara lain untuk mengambil keuntungan atas wilayah perairan Indonesia. Salah satu kasus atas sengketa hukum laut yang menjadi masalah adalah illegal fishing. Kasus yang sempat banyak dibicarakan adalah penangkapan kapal asing pada Kamis tanggal 30 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB yaitu KM. Laut Natuna 28 alias KM Sudhita dengan bendera Thailand yang beroperasi di perairan Laut Natuna pada posisi 010 56.000' LU -- 1060 49.000' BT. yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tepatnya di perairan laut Cina Selatan/perairan Natuna wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kapal tersebut tertangkap saat menggunakan alat penangkap ikan trawl dan ditemukan hasil tangkapan ikan campuran sekitar 100 Kg...”

“...Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia. Pelanggaran juga dilakukan oleh investor atau perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia dan memasok ikan tangkapan hasil pencurian ikan. Menteri KP menyampaikan, bahwa jumlah tangkapan ilegal untuk semua jenis ikan sebuah kapal asing di perairan Indonesia bisa mencapai 300 ton hingga 600 ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia diperkirakan rugi sekitar US\$15 miliar-US\$25 miliar per tahunnya. Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Ratifikasi terhadap UNCLOS, membawa konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat mengenai hak maupun kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan berdasarkan hukum internasional. Implikasi ratifikasi UNCLOS 1982 mengharuskan Indonesia menjaga kekayaan sumber daya alam di laut, serta memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia...”

Sumber :

Hukum Internasional Kontemporer -- Jawahir Thontowi, SH., Ph.D.

Pinsip hegemoni, dengan demikian, dibangun di atas sebuah landasan demokrasi yang terbentuk antara kelompok berkuasa dan kelompok yang dikuasai, sehingga apa yang diciptakannya adalah sebuah masyarakat sipil. Di dalam masyarakat sipil tersebut, pandangan hidup kelas yang dikuasai bukanlah pandangan hidup kelas hegemoni yang dipaksakan secara pasif, tetapi merupakan artikulasi dari berbagai pandangan hidup yang ada dari berbagai kelompok social, yang kemudian disatukan oleh sebuah prinsip artikulasi dari berbagai pandangan hidup yang ada dari berbagai kelompok social, yang kemudian disatukan oleh sebuah prinsip artikulasi yang konduktornya adalah kelas hegemoni (Fiske, 1990). Oleh karena dibangun berlandaskan masyarakat sipil yang demokratis, maka hegemoni tidak pernah berhenti membentuk dirinya, disebabkan berbagai kelompok social yang tersubordinasi secara terus menerus menolak lukisan diri mereka yang digambarkan oleh ideologi dominan untuk mereka. Dengan perkataan lain, akan selalu ada resistensi resistensi yang akan dihadapi oleh ideologi dominan yang harus dicari resolusinya agar selalu dapat memenangkan penerimaan public (Bennet, 1982).

Media dan Politik Informasi

Persoalan ideologis pada media muncul ketika apa yang disampaikan media (dunia representasi), tatkala dikaitkan dengan kenyataan social (dunia nyata), memunculkan berbagai problematika ideologis di dalam kehidupan social dan budaya. Pertanyaan-pertanyaan ideologis yang sering muncul mengenai politik media adalah, misalnya, apakah media merupakan cermin atau refleksi dari realitas? Atau, apakah ia sebaiknya menjadi cermin dari separuh realitas dan menjadi topeng separuh realitas lainnya? Apakah media melukiskan realitas atau sebaliknya mendistorsi realitas.

Ketika media dikendalikan oleh berbagai kepentingan ideologis di baliknya, maka ketimbang menjadi cermin realitas media sering dituduh sebagai perumus realitas sesuai dengan ideologi yang melandasinya (Deleuze & Parnet, 1987). Beroperasinya ideologi di balik media, tidak dapat dipisahkan dari mekanisme ketersembunyian dan ketidaksadaran yang merupakan kondisi dari keberhasilan sebuah ideologi. Artinya, sebuah ideologi itu menyusup dan menanamkan pengaruhnya lewat media secara tersembunyi (tidak terlihat dan halus), dan ia mengubah pandangan setiap orang secara tidak sadar.

Ada berbagai mekanisme beroperasinya ideologi di dalam media, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, mekanisme oposisi biner, yaitu mekanisme penciptaan distribusi makna simbolik berdasarkan sistem kategori pasangan yang bersifat polaristik dan kaku. Setiap hal digeneralisasi dan direduksi sedemikian rupa, sehingga ia hanya dapat berada pada satu kutub (makna simbolik) yang ekstrem, kalau tidak pada kutub ekstrem di seberangnya. Tidak ada pilihan-pilihan tanda, kode, makna, dan bahasa yang beraneka ragam (polysemy). Yang ada hanya pilihan hitam/putih. Mesin-mesin biner ini, menurut Deleuze & Parnet di dalam *Dialogue*, biasanya digunakan oleh sebuah sistem kekuasaan yang represif dan totaliter dalam menciptakan segmentasi kultural secara kaku (dan keras) dengan berbagai cara. Mesin biner ini hanya memproduksi berbagai oposisi biner di dalam masyarakat: oposisi biner kelas social (penguasa/rakyat); oposisi biner seks (wanita-pria); oposisi biner ideologi (pancasilais/antipancasilais); oposisi biner ras (kulit putih/kulit hitam); dan sebagainya (Bourdieu, 1992). Mesin mesin biner ini juga diterapkan di dalam sistem politik media dan politik informasi.

Kedua, akibat logis yang ditimbulkan oleh mesin-mesin oposisi biner adalah berupa mekanisme paralogisme dan kekerasan simbolik di dalam media. Dalam hal ini, disebabkan otoritas kekuasaan yang dimilikinya, kelas dominan selalu mengidentifikasi diri mereka sebagai mulia, baik, benar; sementara orang-orang yang dikuasai/dimusuhi sebagai buruk, jahat, bersalah, subversive, criminal. Kecenderungan membenaran diri sendiri semacam ini pada penguasa ketika diartikulasikan di dalam media, menciptakan sebuah media yang di dalamnya beroperasi apa yang di dalam teori politik informasi disebut Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik, yaitu sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang menyembunyikan dibalikinya pemaksaan dominasi (Thompson, 1984). Dalam hal ini, kekerasan simbolik tidak saja dilihat sebagai bentuk dominasi politik melalui media, akan tetapi bentuk dominasi yang diakui secara salah oleh public, meskipun secara fakta diakui sebagai legitimate (Jalbert, 1983). Di dalam mekanisme

kekerasan symbol, relasi komunikasi saling bertautan dengan relasi kekuasaan, yang di dalamnya hegemoni sebuah sistem kekuasaan dipertahankan dengan mendominasi (mendistorsi) produksi dan interpretasi terhadap media, Bahasa, dan makna yang beroperasi di dalamnya, yang menciptakan pertandaan dan pemaknaan yang serba tunggal: mono-signification dan monosemy.

Ketiga, adalah apa yang disebut oleh Paul L. Jalbert di dalam *Language, Image, Media* sebagai mekanisme *de re* *de dicto*. *De re* berarti tentang sesuatu hal, sedangkan *de dicto* berarti tentang apa yang dikatakan (tentang sesuatu hal). *De re* mengandung transparansi dan kejelasan fakta dan referensi, sedangkan *de dicto* mengandung kekaburan dan ambiguitas fakta dan referensi (Baudrillard, 1983). Media misalnya, menciptakan *de dicto* ketika ia menulis sebagai judul headline-nya "Presiden Mengeluarkan Dekrit". Padahal, yang sesungguhnya terjadi adalah presiden "akan mengeluarkan dekrit" bila situasi dianggap darurat. "Tindakan yang akan dilakukan" direduksi oleh media seolah-olah tindakan tersebut telah dilakukan semata untuk menciptakan daya Tarik dan provokasi terhadap pembaca. Distorsi dan pengaburan makna semacam itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari media dewasa ini, yang terperangkap di dalam paradigma provokasi (kapitalistik) semata untuk mempertahankan rating atau oplah.

Pemaksaan, kekerasan, dan rekayasa di dalam media sering kali berlangsung secara halus dan tak tampak, sehingga tidak disadari sebagai satu pemaksaan, kekerasan, atau rekayasa. Artinya, semuanya berlangsung tanpa disadari oleh orang yang menerimanya. Salah satu bentuk rekayasa media (yang meskipun demikian bukan sebuah bentuk kekerasan) adalah apa yang disebut dengan hiperrealitas media, yaitu penciptaan realitas-realitas artifisial di dalam media yang menciptakan realitas (kebenaran, fakta, kebenaran) tandingan.

Media adalah sebuah *discourse*, yang di dalamnya terdapat relasi-relasi yang tak dapat dipisahkan antara Bahasa yang digunakan, pengetahuan yang melandasi, serta bentuk-bentuk kekuasaan yang beroperasi di baliknya. Media adalah semacam rumah ideologi, yang di dalamnya beroperasi ideologi tertentu yang membentuk dan menentukan arah perkembangan media itu sendiri, menentukan Bahasa (gaya, ungkapan, kosakata) yang digunakan, serta pengetahuan (kebenaran, realitas) yang diproduksinya.

Dalam kaitannya dengan pengetahuan, media (dalam bentuknya yang kapitalistik maupun totaliter) bukanlah selembar kertas putih suci, yang menyampaikan pengetahuan sebagaimana adanya dengan menyingkapkan kebenarannya secara bening. Media, pada kenyataannya, mengandung di dalamnya *prafoks* pengetahuan: antara objektivitas dan subjektivitas, antara kebenaran dan kepalsuan, antara realitas dan simulacra, antara fakta dan rekayasa. Hal ini disebabkan karena media - dalam bentuk kapitalistik dan totaliter - merupakan kendaraan dari sebuah sistem ideologi atau kekuasaan tertentu yang mengendalikannya. Objektivitas, kejujuran, dan transparansi media, akan sangat ditentukan oleh ideologi yang beroperasi dibaliknya, yang pada tingkat tertentu dapat memerangkapnya dalam subjektivitas, kepalsuan, ketidakadilan, dan keberpihakan. Kuatnya dinding ideologi ini akan sangat menentukan batas-batas epistemologis media, apakah akan menyampaikan kebenaran atau malah menyembunyikannya.

Ketika dinding ideologi itu sangat kuat membangun arsitektur sebuah media, maka media tak lebih dari apparatus hegemoni dari sistem ideologi tersebut, yang menyampaikan informasi (atau versi informasi) sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Media tak lebih dari perpanjangan tangan dari sebuah sistem kekuasaan hegemonis, sebuah corong untuk menyebarkan gagasan-gagasan ideologi dominan. Dalam kondisi demikian, media menjadi bagian dari struktur hegemoni yang berperan sebagai alat legitimasi sistem hegemonis yang ada. Akan tetapi, apakah tidak ada posisi media yang selain dari alat hegemonis. Apakah tidak memungkinkan media justru menjadi alat perlawanan dari sebuah kekuasaan hegemonis itu, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi?

Berdasarkan pengertian hegemoni yang luas, media tidak hanya menjadi alat hegemonis, melainkan dapat berperan sebagai kekuasaan hegemonis itu sendiri, yang menjadi bagian dari sistem medan perang simbolik, yaitu medan pertarungan dominasi simbolik di antara berbagai kepentingan, yang di dalam perang tersebut tidak hanya

terjadi proses perjuangan hegemoni, akan tetapi terbentuknya berbagai kekuatan hegemoni tandingan.

Di dalam perang simbolik tersebut, kekuatan (*force*) - dan bagaimna kekuatan tersebut digunakan - akan menentukan siapa yang memperoleh hegemoni. Bila kekuatan sangat dominan dalam perang hegemonic tersebut, dalam pengertian bahwa kekuatan (senjata, politik, massa) digunakan dalam memaksakan sebuah hegemoni, maka prinsip hegemoni menemukan sebetuk penyimpangannya dari bingkai masyarakat sipil sebagaimana yang dikatakan Gramsci, yang di dalamnya berlangsung berbagai bentuk pemaksaan, represi, dan kekerasan. Salah satu kekerasan yang mungkin berlangsung di dalam media adalah apa yang disebut kekerasan symbol.

Istilah kekerasan symbol dipopulerkan pertama kali oleh Pierre Bourdieu di dalam beberapa karyanya, di antaranya *Outline of a Theory of Practice dan Language and Symbolic Power*. Kekerasan symbol, menurut Bourdieu, adalah sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang menyembunyikan di baliknya pemaksaan dominasi. Dengan perkataan lain, di dalam kekerasan symbol berlangsung sebuah pemaksaan hegemoni - sebuah pemaksaan yang bertentangan dengan konsep hegemoni itu sendiri dalam pemahaman Gramsci.

Kekerasan symbol, menurut Bourdieu, adalah "...bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang diterima secara salah dan dengan demikian dipilih dan dipatuhi, kekerasan dalam kaitannya dengan kepercayaan, loyalitas personal, kebaikan, cendera mata, hutang, pengakuan, kesalehan - semua kebajikan, yang dihormati berdasarkan etika penghormatan." (Bourdieu, 1990). Berdasarkan definisi di atas, dpat dilihat bahwa kekerasan simbolik dapat berlangsung di dalam berbagai aktivitas keseharian yang mungkin dianggap dan diterima sebagai aktivitas keseharian yang mungkin dianggap dan diterima sebagai aktivitas *coomon-sense*, yang dilakukan begitu saja tanpa ada keperluan untuk melakukan kritik terhadapnya.

Kekerasan symbol, dengan demikian, adalah kekerasan yang berlangsung disebabkan terdapatnya relasi kekuasaan asimetris mendominasi/yang didominasi (*dominating/dominated*) di balik sebuah pertukaran simbolik, yang di dalamnya pihak yang didominasi berada di dalam kondisi selalu merasa bersalah bila tidak melakukan sebuah persembahan symbol kepada yang mendominasi. Dengan demikian, kekerasan symbol bukanlah sekedar bentuk dominasi yang digunakan melalui media komunikasi atau tanda-tanda; ia adalah penggunaan dominasi melalui media komunikasi sedemikian rupa, sehingga dominasi tersebut diakui secara salah dan meskipun demikian diakui sebagai legitimate serta dipatuhi sebagai sebuah kebenaran (meskipun sesungguhnya tidak benar) (Bourdieu, 1990).

Berdasarkan penjelasan tentang konsep kekerasan simbolik di atas, dapat diliaht adanya perbedaan mendasar antara konsep kekerasan symbol bourdieu dan hegemoni Gramsci. Bil dalam konsep hegemoni aspirasi dari bawah (yaitu dari masyarakat sipil) diserap dan diartikulasikan dengan cara tertentu dalam rangka menenangkan penerimaan public, maka dalam mekanisme kekerasna symbol, sebaliknya, penerimaan public tersebut didistorsi sedemian rupa sehingga public menerima kriteria, konsep, atau nilai nilai kelas dominan untuk menilai diri dan mendefinisikan pandangan hidup mereka sendiri. Di dalam prinsip hegemoni, kelas *hegemonic* menampung berbagai aspirasi public di dalam masyarakat sipil untuk kemudian diartikulasikan, meskipun artikulasi ini dalam kenyataannya juga bersifat tidak utuh, karena mungkin hanya sebagian gagasan dari bawah itu yang diartikulasikan, atau dalam kasus lain mungkin yang diartikulasikan itu hanya tampilah-tampilan permukaannya saja, sementara esensinya disembunyika. Di dalam kekerasan simbolik, masyarakat menerima sebuah relasi kekerasan halus, dan disebabkan halusnya mekanisme kekerasan tersebut ia tidak melihatnya lagi sebagai sebuah kekerasan.

Konsep kekerasan symbol menciptakan sebuah mekanisme social, yang di dalamnya relasi komunikasi saling bertautan dengan relasi kekuasaan. Sebuah sistem kekuasaan berupaya melanggengkan posisi dominannya dengan cara mendominasi atau mendistorsi media komunikasi, Bahasa yang digaanakan dalam komunikasi, tanda-tanda yang dipertukarkan, serta interpretasi terhadap tanda-tanda tersebut melalui sebuah mekanisme kekerasan tak tampak. Dalam konteks Bahasa, yang dikembangkan di dalam

kekerasan simbolik adalah prinsip signifikansi tunggal dan makna tunggal (monosemy), disebabkan dalam kekerasan simbol berbagai makna lain ditekan secara halus sedemikian rupa sehingga tampak bukan sebagai sebuah kebenaran.

Kekerasan simbol terjadi ketika orang yang didominasi menerima sebuah simbol (konsep, gagasan, ide, kepercayaan, prinsip) dalam bentuknya yang distortif tersebut untuk kemudian menggiring mereka untuk menerapkan kriteria evaluasi kelas dominan - yang telah terdistorsi tersebut - dalam menilai diri dan kehidupan mereka sendiri. Di dalam proses dominasi tersebut, sebetulnya terjadi sebetulnya terjadi sebetulnya pemaksaan simbolik yang sangat halus, akan tetapi orang yang didominasi tidak menyadari adanya pemaksaan, atau menerima pemaksaan tersebut sebagai sebuah common-sense.

Di sini tampak perbedaan mendasar lain antara prinsip hegemoni dan prinsip kekerasan simbol. Di dalam prinsip hegemoni, ada pengakuan terhadap pluralitas (ideologi, tanda, makna), yang melaluinya multiplisitas ide atau gagasan dari masyarakat sipil diartikulasikan oleh kelas dominan meskipun dalam bentuk artikulasi yang tidak utuh. Di dalam prinsip kekerasan simbol, sebaliknya, ada upaya untuk menciptakan singularitas, ideologi, tanda, dan makna, disebabkan di dalam prinsip kekerasan simbol ada kecenderungan sebuah sistem kekuasaan dominan untuk melegitimasi makna (yang sebetulnya telah terdistorsi itu) melalui penerimaan publik (secara salah) akan makna yang telah terdistorsi itu di dalam mekanisme penerimaan yang salah dari publik.

Dalam hubungan tersebut di atas, Bahasa, simbol, dan media pada kenyataannya tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, akan tetapi sekaligus sebagai alat kekuasaan, khususnya alat dominasi kekuasaan lewat kekerasan, yaitu mekanisme kekerasan yang halus dan tak tampak. Artinya, orang (yang berkuasa) tidak hanya ingin didengar dan dimengerti, tetapi juga ingin dipercayai, dipatuhi, dihargai, dan diikuti oleh orang-orang yang dikuasai dengan menerapkan cara-cara pemaksaan yang sangat halus. Pemaksaan halus yang didalamnya pihak yang didominasi digiring ke dalam sebuah pemaksaan simbolik, juga berlaku di dalam komunikasi politik, yang didalamnya kelompok yang didominasi merasa bersalah bisa tidak mengikuti, emmatuhi, atau melaksanakan gagasan atau makna-makna yang dipaksakan secara halus oleh kelas dominan atau penguasa (melalui hak otoritasnya untuk berbicara, mengatur, memberi petunjuk), meskipun gagasan atau makna itu boleh jadi salah atau tidak benar.

Untuk menjelaskan Bahasa (dan media) sebagai alat kekuasaan, Bourdieu menggunakan istilah kompetensi, yang bermakna orang yang mempunyai kecakapan dan otoritas untuk berbicara, menafsirkan, menilai, atau melegitimasi Bahasa. Kompetensi ini biasanya dikaitkan dengan kepemilikan apa yang disebut Bourdieu modal simbolik, yaitu modal-modal yang berkaitan dengan kepemilikan status, simbol, prestise, gelar, atau kepemilikan objek-objek simbolik tertentu. Semakin besar seseorang (kelompok orang, negara) menguasai modal simbolik, semakin besar otoritasnya dalam menentukan arah pasar simbol. Seperti sebuah pasar pada umumnya, pasar simbol (baca: pasar media) adalah sebuah ruang dimana posisi seseorang (kelompok orang, negara) - dan kesalingberkaitan di antaranya - sangat ditentukan oleh distribusi dan kepemilikan modal yang mereka miliki (Bourdieu, 1990). Bila *elite* kekuasaan mendominasi modal simbolik ini, yaitu mendominasi segala kompetensi yang diperlukan dalam pemahaman simbol-simbol, maka kekerasan simbolik berlangsung melalui mekanisme perampasan modal simbolik ini dari pemilik yang sebenarnya.

Media seringkali dalam pemberitaan menggunakan istilah kompetensi yang dipakai oleh Bourdieu yaitu orang yang mempunyai kecakapan dan otoritas untuk berbicara, menafsirkan, menilai, atau melegitimasi bahasa. Kompetensi ini biasanya dikaitkan dengan kepemilikan apa yang disebut Bourdieu modal simbolik, yaitu modal-modal yang berkaitan dengan kepemilikan status, simbol, prestise, gelar, atau kepemilikan objek-objek simbolik tertentu. Berikut pemberitaan media tentang perlunya modernisasi alat sista Indonesia dengan upaya melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan dalam joint production.

“...Komitmen pemerintah untuk melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dalam satu dekade dinilai masih kurang kuat. Selain itu agenda transformasi pertahanan juga dinilai tidak mengubah postur anggaran pertahanan secara signifikan.

Berdasarkan penelitian, disimpulkan sejumlah hal yang membuat lemahnya komitmen modernisasi alutsista. Pertama, kepemimpinan sipil memengaruhi pola distribusi anggaran pertahanan. Kedua, upaya Jokowi dalam menciptakan profesionalisme militer lewat peningkatan belanja pegawai, yakni terkait gaji hingga tunjangan. Menurutnya cara itu bertentangan dengan klaim yang selama ini dibangun pemerintah bahwa sebagian besar anggaran pertahanan dihabiskan untuk belanja alutsista. Kedua, Shiskha menyampaikan poros maritim dunia yang menjadi visi Jokowi-Jusuf Kalla pada periode 2015-2019 tidak tergambar dalam distribusi anggaran pertahanan. Dia menyebut TNI AL belum menjadi angkatan bersenjata yang disegani di kawasan. Menurutnya, alokasi belanja alutsista TNI AL tidak mengalami kenaikan signifikan dari TNI AD dan AU...”

Sumber: laporan interaktif CNNIndonesia.com.

“...Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pembicaraan kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan terkait proyek jet tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) - Indonesian Fighter Xperiment (IFX) tetap dilanjutkan...”

“...Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama mengembangkan jet tempur KF-X/IFX. Pesawat tempur itu direncanakan diproduksi 168 unit. Jumlah ini akan dibagi menjadi 120 unit untuk Korea Selatan dan 48 lainnya kepada Indonesia. Pesawat ini juga direncanakan dapat diproduksi massal pada 2026. Namun belakangan pesawat ini mengalami kendala lisensi dari Amerika Serikat. Adapun dana yang telah digelontorkan RI adalah 20 persen dari total riset yaitu US\$7,5 miliar...”

“...Dalam kunjungan ini, kedua pihak sepakat dan mengungkapkan memiliki komitmen yang sama untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan khususnya dalam kerjasama pembangunan kapal selam dan pesawat tempur KFX/IFX. Sekjen Kemhan RI mengatakan bahwa hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan adalah hubungan yang panjang jangka, sehingga kerjasama di bidang pertahanan khususnya kerjasama industri dan teknologi pertahanan harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Beberapa peralatan Alutsista buatan Korea Selatan juga sudah digunakan oleh TNI diantaranya adalah Panzer Tarantula, Meriam 105 dan 155, Kapal Selam dan Pesawat KT-1B Wong Bee dan Pesawat Golden Eagle. Untuk itu, dengan cukup banyaknya peralatan yang digunakan oleh Indonesia dari Korea Selatan, diharapkan Korea Selatan juga dapat membeli banyak lagi membeli pesawat CN-295 buatan industri pertahanan Indonesia. Berkaitan dengan program kerjasama pesawat tempur KFX/IFX yang meskipun saat ini dalam proses renegotiasi, Indonesia ingin dan memiliki tekad serta semangat yang kuat untuk terus melanjutkan kerjasama tersebut dalam rangka tercapainya kemandirian pembuatan pesawat tempur. Sedangkan kerjasama dalam pembangunan kapal selam, kedua negara juga telah sepakat akan dilanjutkan pada Phase ke 2 yakni untuk pembangunan kapal selam ke 4,5 dan 6 yang akan dibangun di PT PAL Surabaya...”

Medan atau pasar adalah sebuah tempat terjadinya pertempuran, dimana setiap individu (atau kelompok social) berupaya mempertahankan atau mengubah distribusi bentuk-bentuk modal simbolik tersebut. Setiap orang yang berpartisipasi di sini mempunyai tujuan yang berbeda-beda: ada yang ingin mempertahankan status quo; sebaliknya ada yang ingin mendobrak status quo - dan peluang untuk menang atau kalah di dalam medan simbolik ini sangat bergantung pada posisi social seseorang di dalam ruang posisi simbolik tadi. Peluang menang atau kalah sangat ditentukan oleh seberapa besar seseorang (kelompok orang, negara) memiliki kekuatan simbolik, yaitu kekuasaan dalam mengendalikan symbol dan mengkonstruksi realitas lewat symbol-simbol tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan pemahaman konsep hegemoni tersebut di atas, maka media massa - sebagai bagian dari alat hegemoni - membentuk sebuah ruang Bersama alat hegemoni tandingan lainnya - yang di dalamnya terjadi perebutan hegemoni yang tidak henti-hentinya, yang di dalamnya gagasan ideologi dimenangkan/ditentang/diubah dalam sebuah proses persaingan yang demokratis. Artinya - sesuai dengan prinsip hegemoni sebagai sebetuk artikulasi - media mempunyai tugas untuk selalu menyerap dan mengartikulasikan berbagai kepentingan dan ideologi lain yang ada di dalam masyarakat agar ia mendapatkan penerimaan public yang lebih luas. Bila tidak, media akan dianggap sebagai alat kekuasaan (reperesif) semat, bukan sebagai alat hegemoni yang demokratis.

Meskipun demikian, proses perebutan hegemoni secara demokratis, khususnya lewat media, seperti yang dikatakan Gramsci, tampaknya adalah sebuah situasi ideal, bahkan mungkin utopis, yang dalam kenyataannya sulit untuk dicapai di dalam politik media dan politik informasi yang ada, tanpa melibatkan pemaksaan atau kekerasan, setidaknya pemaksaan atau kekerasan (berupa trik, rekayasa) yang halus dan tak tampak yang disebut kekerasan simbolik. Berbagai bentuk pemaksaan dan kekerasan ideologis yang tak tampak ini justru merupakan persoalan ideologis media yang dominan dewasa ini.

Media sangat berperan dalam mempengaruhi keberlanjutan kerjasama Joint Production Kapal Selam Changbogo dan Pesawat Tempur KF-X/ IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan. Tema - tema yang diangkat media utamanya dalam pemberitaan media mengenai kedaulatan Wilayah laut Indonesia, kejayaan Angkatan laut Indonesia khususnya tentang Corps Kapal Selam dan Angkatan Udara era Soekarno, maraknya pencurian ikan dan pasir laut di wilayah Indonesia, pelanggaran kedaulatan wilayah laut dan udara Indonesia disebabkan karena lemahnya alutsista Indonesia dalam menjaga wilayahnya, serta pemberitaan media mengenai modernisasi alutsista Indonesia utamanya tentang kerjasama pembuatan kapal selam Changbogo dan pesawat tempur KF-X / IF-X antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan.

REFERENSI

- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Serba Jaya, 2011.
- Baudrillard, Jean. *In the Shadow of the Silent Majorities*. Semiotexte, 1983.
- Bennet, Tonny. "Media, Reality, Signification", dalam Michel Gurevitch (ed), *Culture, Society and the Media*. Methuen, 1982.
- Bourdieu, Pierre. *Outliner of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, 1990.
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge University Press, 1990.
- Callistasia Wijaya BBC News Indonesia, 1 Mei 2019
- Deleuze, Gilles & Claire Parnet. *Dialogue*. Athlone Press, 1987.
- Faiq Hidayat, Didi Syafirdi, Sumber ©2015 Merdeka.com. diakses 20 Mei 2020.
- Fiske, John. *Introduction to Communication Studies*. Routledge, 1990.
- Gramsci, Antonio. *Selections from Prison Notebooks*. Lawrence & Wishart, 1991.
- <http://hidayatpratama.blogspot.com/2012/05/uraian-singkat-kasus-sengketa-indonesia.html>, diakses 20 Mei 2020.
- <https://katadata.co.id/infografik/2020/01/11/negara-maritim-ini-tiga-batas-laut-indonesia>
Diakses 20 Mei 2020.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/17/180000069/3-pembagian-wilayah-laut-indonesia?page=all>. Diakses 20 Mei 2020.
- John B. Thompson, *Studies in the Theory of Ideology*, Polity Press, 1984,
- Mouffe, Chantal (ed). *Gramsci and Marxist Theory*. Routledge & Kegan Paul, 1979.
- Muslim. *Konstruksi Media Tentang Serangan Israel Terhadap Libanon: Analisis Framing Terhadap Berita Tentang Peperangan Antara Israel dan Libanon dalam Surat Kabar Kompas dan Republika*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 17, No. 1 (Januari-Juni 2013).
- Paul L. Jalbert, "Some Constructs for Analysing News", dalam Howard David & Paul Walton, *Language, Image, Media*. Basil Blackwell, 1983.

Piliang, Yasraf A. *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.

Yunus, Syarifuddin. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010